



PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paragraf 7 Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah anggaran berakhir;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005](#) tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. [Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001](#) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerepan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
Dan  
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

- (1) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan arus kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.144.433.759.943,70
b. Belanja	Rp	1.188.951.657.800,00
c. Surplus/defisit	Rp	(44.517.897.856,30)
a. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	136.873.591.270,48
- Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	136.873.591.270,48
b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		
- Surplus/ Defisit	Rp	(44.517.897.856,30)
- Pembiayaan Netto	Rp	136.873.591.270,48
SILPA	Rp	92.355.693.414,18

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp53.093.435.072,77 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.197.527.195.016,47
b. Realisasi	Rp	1.144.433.759.943,70
Selisih lebih/(kurang)	Rp	53.093.435.072,77

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp14.513.554.293,95 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	1.334.087.222.093,95
b. Realisasi	Rp	1.188.951.657.800,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	145.145.564.293,95

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(92.042.129.221,18) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(136.560.027.077,48)
b. Realisasi	Rp	(44.517.897.856,30)
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(92.042.129.221,18)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(313.564.193,00) dengan rician sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	136.560.027.077,48
b. Realisasi	Rp	136.873.591.270,48
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(313,564,193,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(313.564.193,00) Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	136.560.027.077,48
b. Realisasi	Rp	136.873.591.270,48
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(313.564,193,00)

(7) Selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran sejumlah Rp(92.355.693.414,18) Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	92.355.693.414,18
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(92.355.693.414,18)

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	136.560.027.077,48
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	136.560.027.077,48
Selisih	Rp.	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	92.355.693.414,18
Sub Total	Rp.	92.355.693.414,18
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	92.355.693.414,18

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember

2017 Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp. 2.099.631.070.703,20
b. Jumlah kewajiban	Rp. 48.469.237.492,13
c. Jumlah ekuitas	Rp 2.051.161.833.211,07

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp 1.238.424.530.359,47
b. Beban-LO	Rp 1.225.109.105.929,53
Surplus/defisit Operasi-LO	Rp (178.386.201,20)
c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp (12.888.811.356,14)
d. Pos Luar Biasa	Rp (604.999.275,00)
e. Surplus/Defisit	Rp (178.386.201,20)

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

➤ Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 151.582.455.865,70
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp. (196.100.353.722,00)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. 313.564.193,00
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 355.000,00
e. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	Rp. (44.203.978.663,30)

➤ Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017

a. Saldo Awal Kas di BUD	Rp. 136.559.672.077,48
b. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp. 92.355.693.414,18
c. Saldo Akhir Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp. 2.041.379.788,76
d. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00
e. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	Rp. 0,00
f. Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan JKN	Rp. 0,00
g. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2017	Rp. 94.397.073.202,94

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.034.653.481.987,09
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. (178.386.201,20)
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. 16.686.737.425,18
Ekuitas Akhir	Rp. 2.051.161.833.211,07

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2017 menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realiasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang pajak daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang retribusi daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar piutang lainnya;
- Lampiran I.8 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.10 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.11 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.12 : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.13 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;



- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan arus kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : ( 4,20/2018 )